

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019
Waktu : 13.30 s.d. 21.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA. 2019;
3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020;
4. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
7. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
9. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi);
10. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
14. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
15. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
16. Denaldy Mulino Mauna, S.E., M.H., M.B.A., M.S. (Direktur Utama Perum Perhutani);
17. Agus Setya Prastawa (Direktur Utama PT Inhutani I);
18. Pramusti Indrascaryo (Direktur Utama PT Inhutani II);
19. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
20. Ir. Ahmad Ibrahim, M.Sc. (Direktur Utama PT Inhutani IV);
21. Ir. Natalas Anis Harjanto, M.Sc. (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober TA, 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 serta Pagu Anggaran Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp9.319.325.816,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pendalaman lebih detail terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi selama tahun 2019. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti seluruh keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 sebagai langkah antisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi seluruh aspek administrasi dan aspek legal atas seluruh proses alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk rencana pengembangan wilayah Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penyerahan \pm 4,1 juta hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, dan untuk selanjutnya memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan, melalui program Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mulai Tahun 2020 dapat menyediakan anggaran untuk program/kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan melibatkan dan/atau bekerja sama dengan pemerintah daerah.
7. Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang relevan untuk melakukan pengembangan sentra atau zonasi program unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.30 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151